

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN
PESERTA DIDIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM
PENERIMAAN SISWA BARU SECARA ONLINE DI
SMA NEGERI 1 LABUHAN DELI**

SKRIPSI

Oleh:

PUTRI WULAN DARI
NPM. 1403100178

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

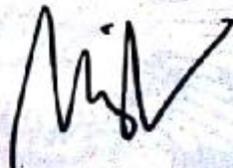
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **PUTRI WULAN DARI**
N P M : 1403100178
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN SISWA BARU SECARA ONLINE DI SMA NEGERI 1 LABUHAN DELI**

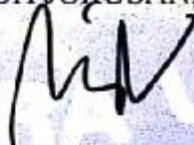
Medan, 23 Maret 2018

PEMBIMBING I



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

DISETUJUI OLEH:
KETUA JURUSAN,



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

PL DEKAN,



DIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

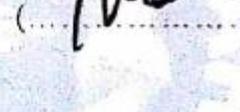
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **PUTRI WULAN DARI**
N P M : 1403100178
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, tanggal : Kamis, 29 Maret 2018
Waktu : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

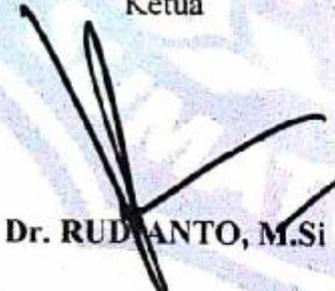
PENGUJI I : **IDA MARTINELLY, S.H, M.M**
PENGUJI II : **SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H**
PENGUJI III : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

()
()
()

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. RUDANTO, M.Si


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, PUTRI WULAN DARI, NPM 1403100178, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Maret 2018

Yang menyatakan,



PUTRI WULAN DARI



Unggul Cerdas & Terpercaya
 menjembatani ke arah kemajuan
 di dan lingkungannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kepten Muchtar Baer No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8624567 - (061) 8616490 Ext. 200-201 Fax. (061) 8625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : PUTRI WULAN DARI
 NPM : 1403100178
 Jurusan : Kebijakan publik
 Judul Skripsi : Implementasi peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 tahun 2017 tentang tata cara penerimaan peserta didik dalam rangka pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru secara online di SMA Hegien 1 Lubukhad

No.	Tanggal	Kegiatan Adv/s/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	18 Januari 18	Perbaiki pedoman wawancara	ak
2.	22 Januari 18	Perbaiki pedoman wawancara	ak
3.	26 Januari 18	Perbaiki pedoman wawancara	ak
4.	2 Februari 18	Perbaiki abstrak dan kategorisasi	ak
5.	7 Februari 18	Perbaiki abstrak	ak
6.	12 Februari 18	Perbaiki pembahasan	ak
7.	27 Februari 18	Perbaiki daftar pustaka	ak
8.	15 Maret 18	Perbaiki abstrak kembali	ak
9.	23 Maret	Acc Skripsi	ak

Medan, 23 Maret 2018

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke :

Dr. Zul Fahmi, M.I.Pd

(NAIL KHAIRIAH S. I.P.Hpd

(NAIL KHAIRIAH S. I.P.Hpd

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN SISWA BARU SECARA ONLINE DI SMA NEGERI 1 LABUHAN DELI

PUTRI WULAN DARI
1403100178

Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru merupakan segala bentuk jasa pelayanan publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat ataupun daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan gubernur Sumatera Utara.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik dalam rangka pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru secara online di SMA Negeri 1 Labuhan Deli sudah terimplementasi dengan baik atau tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, teknis analisis kualitatif yaitu suatu metode yang memperoleh informasi yang mendalam dari pada banyaknya informasi yang ada sebagaimana faktanya. Dalam penelitian ini ada 4 orang pegawai di SMA Negeri 1 Labuhan Deli dan 3 orang masyarakat/ orang tua siswa yang menjadi narasumber, diantaranya satu orang wakil kepala sekolah dibidang kurikulum, tiga orang staff tata usaha dan tiga orang tua siswa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat hasil yang diperoleh yaitu bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 tahun 2017 tentang tata cara penerimaan peserta didik dalam rangka pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru secara online di SMA Negeri 1 Labuhan Deli sudah terimplementasi tetapi belum sesuai dengan harapan yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara tersebut. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pegawai dan kurangnya sosialisasi yang maksimal, maka pelayanan yang diberikan masih belum sesuai yang diharapkan.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kesehatan rohani dan jasmani kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah-Nya kepada seluruh umat manusia sehingga kita dapat menuju jalan yang lebih baik.

Penulis menyelesaikan skripsi ini untuk memperoleh gelar sarjana (SI). Skripsi ini berisikan hasil penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang tata cara penerimaan peserta didik dalam rangka pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru secara online di SMA Negeri 1 Labuhan Deli”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan rendah hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari para pembaca yang nantinya dapat berguna untuk menyempurnakan skripsi ini. Selama penyelesaian ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu didalam proses pengerjaan skripsi ini.

Teristimewah dan paling utama serta paling tercinta dan tersayang kepada kedua orang tua saya yakni ayahanda Jumri dan Ibunda Hozlina yang telah mendukung dan membantu saya baik dari segi moril ataupun materil, yang selalu mendukung dan memotivasi serta memberikan do'a restu kepada saya untuk terus maju menggapai cita-cita saya. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam melangkah kedepan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi sesuai dengan syariah islam. Kepada adik saya Sintia Pratiwi yang selalu memberi dukungan berupa do'a, semangat dan motivasi kepada saya demi keberhasilan saya dalam menyelesaikan pendidikan saya sampai akhir penulisan skripsi ini.

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Alm. Tasrif Syam M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Rudianto, M.Si selaku Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah S.IP M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah S.IP M.Pd selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membantu dan memberikan arahan serta waktunya dalam pengerjaan skripsi saya.

6. Dosen serta seluruh Pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan. Permohonan maaf juga saya ucapkan kepada seluruh dosen yang telah mengajar saya, atas segala tingkah laku ataupun perkataan yang tidak berkenan.
7. Seluruh Pegawai Staff Biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Negeri Sipil SMA Negeri 1 Labuhan Deli yang telah memberikan kesempatan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasinya.
9. Kepada abangda Khoeros Sadad Rizky Pradana yang selalu memberikan arahan kepada saya, selalu meluangkan waktunya untuk membantu saya serta mendukung didalam pengerjaan skripsi ini.
10. Kepada teman seperjuangan dari sekolah hingga perkuliahan Eko Febrianda dan Cindy Kurnia.
11. Kepada teman-teman saya Kebijakan Publik kelas malam terkhususnya kepada Gusti Suci Utami, Irma Friyanti, Desy Astria Sipayung, Meri Yangki, Venni Malinda, Sefira Wardany, Danu Muhazir, Dodi Syahputra, Alfredo Putra Hulu, Fauzan Muiz Purba, Citra Aprilia, Sopiah Sulaiman serta seluruh teman-teman yang lainnya yang sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri.

12. Kepada teman-teman Ilmu Administrasi Negara Angkatan Tahun 2014.

Dan kepada semua teman-teman terdekat yang tidak tertulis namanya satu persatu di skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan semoga Allah SWT membalas semua budi baik mereka yang telah membantu penulis hingga skripsi ini selesai. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembacanya dan bagi ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Ilmu Administrasi Negara.

Medan, 23 Maret 2018

PUTRI WULAN DARI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Penelitian	8

BAB II URAIAN TEORITIS

A. Konsep Kebijakan	10
1. Pengertian Kebijakan	10
2. Pengertian Kebijakan Publik	11
B. Konsep Implementasi Kebijakan	13
1. Pengertian Implementasi	13
2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	15
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik	17
C. Konsep Pelaksanaan	19
1. Pengertian Pelaksanaan	19
2. Pengertian Program	20
D. Sistem Online	21
1. Pengertian Sistem	21
2. Pengertian Online	22
3. Karakteristik Sistem	24
4. Klasifikasi Sistem	26

E. Konsepsi Penerimaan Siswa Baru	28
1. Penerimaan Siswa Baru	28
2. Buku Induk	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Definisi Konsep	31
C. Kerangka Konsep	32
D. Kategorisasi	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
G. Narasumber	37
H. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
I. Deskripsi Lokasi Penelitian	37
1. Sejarah SMA Negeri 1 Labuhan Deli	37
2. Visi dan Misi SMA Negeri 1 Labuhan Deli	41
3. Gambaran Umum	42
a. Letak SMA Negeri 1 Labuhan Deli	42
b. Jumlah Siswa	42
c. Struktur Organisasi	43
4. Tugas dan Fungsi Pegawai di SMA Negeri 1 Labuhan Deli	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data	53
B. Hasil Wawancara berdasarkan Kategorisasi	56
C. Analisis Data dan Pembahasan	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	33
Gambar 3.2 Komponen dalam Analisis Data	36
Gambar 3.3 Struktur Organisasi	44

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Siswa	42
Tabel 4.1 Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin	54
Tabel 4.2 Narasumber berdasarkan Umur	55
Tabel 4.3 Narasumber berdasarkan Jabatan/Pekerjaan	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat saat ini, disadari atau tidak telah merubah pola pikir, budaya, cara pandang dan tingkah laku masyarakat. Bukti perkembangan itu antara lain dengan munculnya teknologi komputer. Keberadaan perkembangan komputer disegala sektor kehidupan telah membawa dunia ke sebuah era baru, yaitu abad informasi. Perkembangan teknologi juga menuntut dunia pendidikan untuk memanfaatkannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia agar tidak tertinggal jauh dengan bangsa lain.

Sejak era reformasi, semangat untuk membangun pemerintahan yang bersih (clean government) dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) meningkat di seluruh lapisan institusi pemerintahan RI tidak terkecuali di Sumatera Utara. Departemen pendidikan nasional berikut seluruh jajaran departemen pendidikan bekerja sama dengan TELKOM sebagai salah satu perusahaan berbasis teknologi nasional mengembangkan sistem penerimaan siswa baru (PSB) berbasis online yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya dan memberikan kesempatan kepada mereka yang berasal atau berdomisili di luar daerah, terutama kabupaten dan kota se-provinsi untuk dapat berkompeten di sekolah yang dipilihnya agar lebih

transparan, objektif dan berkeadilan. Sehingga hal ini dapat meminimalisir adanya kecurangan serta masalah-masalah dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB).

Menurut Tri Murwaningsih (2009: 91), pendidikan pada era global memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam bidangnya, untuk mewujudkan masyarakat maju dan bersaing dalam menjawab tantangan global. Melihat hal tersebut, pemerintah yang diberi kewajiban oleh konstitusi negara dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan terus menerus memberikan pelayanan yang berkualitas dan mudah diakses dalam mewujudkan tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa deskriminasi.

Penerimaan Siswa Baru merupakan gerbang bagi warga negara untuk memperoleh hak mereka mengenai pelayanan pendidikan yang bermutu. Karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya dengan menghilangkan segala hambatan yang dapat membuat warga negara kesulitan memasukan anak ke sekolah.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang sebagai institusi pendidikan di Kabupaten Deli Serdang mencoba menerapkan sistem komputerisasi Penerimaan Peserta Didik Baru dalam bentuk Penerimaan Siswa Baru (PSB) *Online*. Sistem ini sebagai wujud inovasi dalam pemanfaatan

teknologi informasi di dunia pendidikan untuk meningkatkan mutu pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat pengguna layanan. Sesuai dengan Keputusan MENPAN Nomor 81/1995 ditetapkan beberapa kriteria pelayanan prima antara lain meliputi kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata, serta ketepatan waktu.

Tahun ajaran 2017/2018 ini Penerimaan Siswa Baru *Online* merupakan serangkaian proses penerimaan siswa baru SMP dan SMA dengan sistem *real time*. Bagi lulusan SD seleksi tersebut menggunakan nilai UASBN dan untuk lulusan SMP menggunakan nilai UAN. *Real time* mengandung maksud bahwa ketika peserta didik mendaftar pada sebuah sekolah akan langsung dinilai oleh *engine* secara sistemik (menggunakan parameter-parameter). Melalui sistem ini calon peserta didik dapat memantau proses seleksi, perangkingan hingga publikasi pengumuman melalui website secara online.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Deli Serdang telah menerapkan sistem online dalam Penerimaan Siswa Baru sejak tahun 2017. Selama kurun waktu berjalannya program ini ditemukan kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Kelebihan dari program ini yaitu pelaksanaan proses Penerimaan Siswa Baru dinilai lebih praktis dan efisien, sebagai salah satu bentuk pemanfaatan, pembelajaran, pengenalan terhadap stakeholders pendidikan mengenai teknologi informasi dan komputerisasi. Program ini juga meningkatkan kerjasama antara pemerintah khususnya Disdikpora Kabupaten Deli Serdang dengan instansi lain, memberikan fasilitas

akses info Penerimaan Siswa Baru dengan cepat, mudah dan akurat. Disebabkan sistem ini tergolong masih baru diterapkan, maka masih banyak ditemukan kekurangan dan hambatan yang perlu di perbaiki sehingga tercapai tujuan dari sistem online ini.

Pelaksanaan program PSB Online sebagai salah satu praktik pendidikan dari tahun ke tahun mengalami perbedaan, baik dari kelebihan/manfaat maupun hambatan-hambatan yang terjadi, serta tentu saja masih memerlukan berbagai penyempurnaan. Menurut Sukmadinata (2006: 121) program atau kegiatan pendidikan adalah sesuatu yang dinamis, berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan tuntutan perubahan masyarakat. Evaluasi program PSB Online ini perlu dilakukan untuk mengetahui capaian atau efektifitas program agar bisa memberikan masukan bagi pengembangan dan penyempurnaan program berikutnya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan perubahan tersebut.

Beberapa kelemahan juga masih ditemukan dan dinilai sebagai bentuk penyimpangan pelaksanaan program PSB *online*. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai sumber masyarakat banyak menyuarakan kekecewaan pelaksanaan PSB online. Bentuk kekecewaan masyarakat antara lain bahwa dalam tahun pertama pelaksanaannya ditemukan banyak kecurangan/penyimpangan. Beberapa penyimpangan tersebut yang antara lain adanya peserta didik baru yang bisa menempati kursi kosong meski proses pembelajaran sudah berjalan satu bulan, adanya guru sekolah negeri yang meminta prioritas penambahan kuota dengan mengistimewakan keluarga meski nilai tidak memenuhi syarat. Ditemukan pula penyimpangan berupa “pendongkrakkan” nilai calon siswa agar dapat melampaui

passing grade sekolah yang dituju, serta masih carut marutnya sistem (antara lain info PSB online yang “nyasar”, tidak bisa diakses bahkan portal situsnya tidak bisa dibuka sama sekali). Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa masih banyak masyarakat yang gagap soal internet.

Dinas Pendidikan Pemrov Sumut mulai menggelar PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) secara online untuk tahun ajaran 2017/2018. Sistem PPDB Online ini diadopsi dari Bandung dan menjadi bagian dari rencana aksi KPK dalam rangka supervisi di Sumut. Namun persoalan muncul saat sistem ini mulai diterapkan. Seperti adanya keterbatasan kapasitas server situs website yang disiapkan Dinas Pendidikan Pemrov Sumut, sehingga mengakibatkan tidak mencukupinya data yang masuk ke situs website. Alhasil sejumlah sekolah kesulitan memproses data calon peserta didik ke situs website <http://ppdbdidik@sumutprov.go.id>. (Data ini diperoleh dari Tribun-Medan.com yang dimuat pada Kamis, 15 Juni 2017) .

Selain itu Sistem penerimaan siswa baru secara online yang kurang memuaskan terjadi di banyak sekolah khususnya di ruang lingkup SMA Negeri 1 Labuhan Deli karena cara atau sistem penerimaan yang cukup rumit untuk siswa yang akan mendaftar. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 52 tahun 2017 tentang tata cara penerimaan peserta didik, Gubernur dan Walikota/Bupati Medan diinstruksikan untuk melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap penerimaan siswa baru secara online. Agar tidak ada lagi kecurangan didalam penerimaan siswa dan memudahkan orang tua/wali murid untuk melakukan pendaftaran.

Dengan demikian Penerimaan siswa Baru (PSB) Online di SMA Negeri 1 Labuhan Deli memiliki banyak masalah seperti masih banyaknya orang tua yang tidak paham akan Sistem Online ini, sarana dan prasarana yang belum memadai seperti server situs yang berkapasitas masih rendah, kurangnya dukungan Pemerintah Pusat dan masyarakat dalam Pelaksanaan Sistem Online di daerah.

Tidak ada yang salah dengan hal tersebut menurut teori, penerimaan siswa secara online seharusnya lebih memudahkan bagi orang tua atau siswa dalam mendaftar, menghemat waktu dan biaya pendaftaran. Tetapi pada kenyataan dilapangan tidak seperti itu, pada benak sebagian masyarakat yang mayoritasnya tidak terlalu paham akan internet hal ini justru dianggap lebih mempersulit masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan proposal dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN SISWA BARU SECARA ONLINE DI SMA NEGERI 1 LABUHAN DELI”.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang paling penting dilakukan sehingga peneliti dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji atau dibahas didalam suatu penelitian.

Berdasarkan masalah yang telah di uraikan dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang tata cara penerimaan peserta didik dalam rangka pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru secara online di SMA Negeri 1 Labuhan Deli?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan. Untuk melihat betapa pentingnya arti tujuan dalam suatu penelitian, maka yang menjadi tujuan penulis di dalam penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan gubernur Sumatera Utara nomor 52 tahun 2017 tentang tata cara penerimaan peserta didik dalam rangka pelaksanaan sistem penerimaan siswa didik baru secara *online* di SMA Negeri 1 Labuhan Deli.

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan selalu mengharapkan agar penelitian tersebut memberi manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul di lingkungannya.
- b. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan disamping hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.
- c. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang tata cara penerimaan peserta didik dalam rangka pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru secara *online* di SMA Negeri 1 Labuhan Deli.

D.Sistematika Penulisan

Sistematika dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

Bab I tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Berisikan Uraian Teoritis yang menguraikan tentang Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Penerimaan Siswa Baru Secara Online Di SMA Negeri 1 Labuhan Deli, teori-teori dan masalah-masalah yang akan diteliti.

Selanjutnya pada Bab III berisikan persiapan dan pelaksanaan yang menguraikan tentang metode/jenis penelitian, penetapan narasumber/informan, teknik pengumpulan data, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 1 Labuhan Deli.

Berikutnya mengenai Bab IV berisikan tentang analisa data penelitian yang menguraikan tentang pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru secara online di SMA Negeri 1 Labuhan Deli.

Terakhir Bab V berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh serta saran-saran yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Konsepsi Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan pada umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berfikir. Dibuatnya suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan untuk mencapai tujuan, menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan juga dibuat untuk menjamin konsistensi tujuan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan.

Menurut Tahir (2014:12), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Menurut Nugroho (2003: 7) bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin dalam Mulyadi (2016:38) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan :

- a) Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b) Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang – undang.
- c) Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu.

Kebijakan publik menurut Winarno dalam Munandi (2017:17) adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah yang dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor, bukan pemerintah.

Menurut William N. Dunn (2003:132) kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Pengertian kebijakan publik oleh para pakar didefinisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya. Thoha (2011) memberikan penafsiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat.

Mengenai kebijakan publik, Wahab (2012) mengemukakan bahwa:

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku / tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan.
2. Kebijakan publik pada hakikatnya terdiri dari tindakan- tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas / tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu.
4. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang – bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan kebijakan publik adalah jalan untuk mencapai tujuan bersama yang di cita-citakan. Jadi cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan.

B. Konsep Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan diterapkan, Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Implementasi menurut teori Jones dalam Mulyadi (2016:45) ialah proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, sedangkan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri. Dalam implementasi sebuah kebijakan akan melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi *street level* (Lipsky) untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku target group. Banyak orang beranggapan bahwa setelah

kebijakan publik disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu dapat dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

Tahapan implementasi kebijakan dapat dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkret atau mikro (wibawa dalam mulyadi 2016:47).

Pendekatan kedua, menurut *Grindle* dalam mulyadi (2016:47) implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan *Van meter dan Van Horn* (wibawa, dkk . 1994:15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. *Grindle* (1980:7) menambah bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran

Schubert dalam Nurdin dan Usman (2002:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti

bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan dan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi obyek berikutnya yaitu kurikulum. Dalam kenyataannya, implementasi kurikulum menurut Fullan merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.

Dalam konteks implementasi kurikulum pendekatan-pendekatan yang telah dikemukakan di atas tujuannya adalah memberikan tekanan pada proses. Esensi implementasinya adalah suatu proses suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing pendekatan itu mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses implementasi kebijakan publik akan berhasil jika di dalamnya ada komunikasi yang baik antara implementator dengan pihak terkait, kesiapan sumber daya yang dimiliki, sikap birokrasi atau pelaksana yang mendukung serta struktur organisasi yang mendukung implementasi pelaksanaan kebijakan publik tersebut.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016:57) merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai: “ Tindakan –tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan – tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan.

Implementasi kebijakan publik merupakan kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy maker untuk mempengaruhi perilaku birokrasi pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono,2010:87).

Patton dan Sawichi dalam Tangkisan (2003:29) menyatakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain:

- i. Adanya tujuan yang ingin dicapai
- ii. Adanya kebijakan-kebijakan yang harus di pegang dan prosedur yang harus dilalui.
- iii. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus di lalui.
- iv. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- v. Adanya strategi dalam pelaksanaan.

Dengan demikian implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

George edwards III dalam mulyadi (2016:58) ada beberapa factor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik.

1. Komunikasi

Persyaratan pertama yang dalam pelaksanaan yang efektif adalah bahwa yang melaksanakan tugas tersebut mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Jadi ada suatu kejelasan tentang apa yang harus dilakukan, selanjutnya dalam komunikasi ini perlu adanya konsistensi dari apa yang harus dilakukan, artinya tidak adanya pertentangan antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya, sukses tidaknya pelaksanaan dilihat dari aspek komunikasi adalah bagaimana tugas atau fungsi tertentu dilakukan.

2. Sumber Daya

Sumber daya disini maksudnya adalah beberapa sumber daya manusia atau meliputi staf-staf dengan keahlian yang baik untuk informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas dalam menerjemahkan suatu pertemuan dalam pelaksanaannya, staf tersebut harus memadai jumlahnya dalam melaksanakan suatu program, namun tidak hanya jumlah tetapi juga harus didukung oleh keahlian yang baik dalam tugas tersebut, informasi menyangkut bagaimana melaksanakan suatu hal dan data ketataan dari personil-personil lain terhadap peraturan pemerintah, wewenang adalah otoritas yang dimiliki oleh pelaksana dalam melakukan tugasnya termasuk dalam penerapan sanksi jika ada pelanggaran, apakah sudah cukup memadai, fasilitas-fasilitas dalam menerjemahkan suatu peraturan dalam pelaksanaannya mutlak diperlukan dalam melakukan tugas tertentu, seperti bangunan fisik, kendaraan dan lain-lain.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu

dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar.

C. Konsepsi Pelaksanaan

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari seluruh proses manajemen, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi *actuating* justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

2. Pengertian Pelaksanaan program

Hasibuan (2006: 7) mengungkapkan bahwa program adalah suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Selain itu, definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, menyatakan bahwa: **“Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat”**.

Dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau *outcomes*. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat

berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program.

D. Sistem Online

1. Pengertian Sistem

Istilah sistem sering kali digunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang saling berinteraksi satu sama lain. Kata sistem seringkali kita dengar dalam kehidupan maupun percakapan sehari-hari. Istilah sistem sering digunakan untuk banyak hal, dan berbagai bidang sehingga maknanya menjadi sangat beragam. Namun kita dapat mengartikan sistem secara umum merupakan sekelompok elemen yang berintergrasi dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas proses pendidikan adalah pendekatan sistem. Melalui pendekatan sistem kita dapat melihat berbagai aspek yang dapat memengaruhi keberhasilan suatu proses. Sistem adalah satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka ada tiga hal penting yang menjadi karakteristik suatu sistem. Pertama, setiap sistem pasti memiliki tujuan. Tujuan merupakan ciri utama suatu sistem. Tidak ada sistem tanpa tujuan. Tujuan merupakan arah yang harus dicapai oleh suatu pergerakan sistem. Kedua, sistem selalu mengandung suatu proses. Proses adalah rangkaian kegiatan. Kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan. Semakin kompleks tujuan, maka semakin rumit juga proses kegiatan. Ketiga, proses kegiatan dalam suatu sistem selalu melibatkan dan memanfaatkan berbagai komponen atau unsur-unsur tertentu.

Oleh sebab itu, suatu sistem tidak mungkin hanya memiliki satu komponen saja. Sistem memerlukan dukungan berbagai komponen yang satu sama lain saling berkaitan.

Atas dasar pengertian diatas, maka jelas sistem bukanlah hanya sebagai suatu cara, seperti yang banyak dipahami oleh banyak orang selama ini. Cara hanyalah bagian dari rangkaian kegiatan suatu sistem. Yang pasti adalah sistem selalu bertujuan, dan seluruh kegiatan dengan melibatkan dan memanfaatkan setiap komponen diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Suatu sistem merupakan proses untuk mencapai tujuan melalui pemberdayaan komponen-komponen yang membentuknya, maka sistem erat kaitannya dengan perencanaan. Perencanaan adalah pengambilan keputusan bagaimana memberdayakan komponen agar tujuan berhasil dengan sempurna. Oleh sebab itu, proses berpikir dengan pendekatan sistem memiliki daya ramal akan keberhasilan suatu proses. Artinya, apabila seluruh komponen yang membentuk sistem bekerja sesuai dengan fungsinya, maka dapat dipastikan tujuan yang telah ditentukan akan tercapai secara optimal; sebaliknya manakalah komponen-komponen yang membentuk sistem tidak dapat bekerja sesuai dengan fungsinya, maka pergerakan sistem akan terganggu, yang berarti akan menghambat pencapaian tujuan.

2. Pengertian Online

Pengertian Online adalah keadaan komputer yang terkoneksi/terhubung ke jaringan Internet. Sehingga apabila komputer kita online maka dapat mengakses

internet/browsing, mencari informasi-informasi di internet. (<http://www.temukan-pengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>).

Daring (bahasa Inggris: *online*) dan luring (bahasa Inggris: *offline*) memiliki makna tertentu dalam hal teknologi komputer dan telekomunikasi. Secara umum, "*online*" menunjukkan keadaan terhubung, sementara "*offline*" menunjukkan keadaan terputus. Daring juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan komputer yang dapat saling bertukar informasi karena sudah terhubung. Konsep ini telah diperluas dari makna komputasi dan telekomunikasi ke dalam bidang interaksi manusia dan percakapan, sedemikian rupa bahkan luring (*offline*) dapat digunakan berlawanan dengan penggunaan umum daring (*online*). Misalnya, diskusi yang terjadi selama sebuah pertemuan bisnis "*online*", sementara isu-isu yang tidak perhatian semua peserta pertemuan harus "*diambil offline*" - dilanjutkan di luar pertemuan. (https://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan_dan_luar_jaringan).

Online merupakan istilah bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu "On" dan "Line". Kedua kata ini memiliki makna tersendiri bila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia. On berarti sedang berlangsung, sementara Line mengandung arti garis atau saluran. Jika kedua kata ini digabungkan menjadi Online maka akan terbentuk pengertian baru yang tidak jauh-jauh dari pengertian dasar yang telah dijelaskan sebelumnya. Online adalah istilah yang digunakan untuk memaknai sesuatu yang sedang berlangsung atau terjadi dalam satu jaringan/saluran yang dikenal dengan internet.

(<http://www.homefage.ga/2016/04/dulu-istilah-online-tak-setenar-seperti.html>).

Dari kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem online adalah proses untuk mencapai tujuan melalui pemberdayaan komponen-komponen yang membentuknya, dalam suatu jaringan yang tersambung dengan internet melalui komputer.

3. Karakteristik Sistem

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen (*components*), batas sistem (*boundary*), lingkungan luar sistem (*environments*), penghubung (*interface*), masukan (*input*), keluaran (*output*), pengolah (*process*) dan sasaran atau tujuan.

a. Komponen Sistem

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.

b. Batas Sistem

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan.

c. Lingkungan Luar Sistem

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedang lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak maka akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem.

d. Penghubung Sistem

Penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya. Keluaran dari satu subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem yang lainnya dengan malalui penghubung.

e. Masukan Sistem

Masukan (*input*) adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. masukan dapat berupa masukan perawatan (*maintenance input*) dan masukan sinyal (*signal input*). Masukan perawatan adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran.

f. Keluaran Sistem

Keluaran (*output*) adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Misalkan untuk sistem komputer, panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna dan merupakan hasil sisa pembuangan, sedangkan informasi adalah keluaran yang dibutuhkan.

g. Pengolahan Sistem

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran.

h. Sasaran Sistem

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya.

4. Klasifikasi Sistem

Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandangan, diantaranya adalah sebagai berikut ini.

a. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak dan sistem fisik.

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik.

- b. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah dan sistem buatan manusia.

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin disebut dengan human-machine sistem atau ada yang menyebut dengan man-machine.

- c. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu dan sistem tak tentu.

Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Sistem komputer adalah contoh dari sistem tertentu yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program yang dijalankan. Sedangkan sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas.

- d. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup dan sistem terbuka.

Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak luarnya. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruhi dengan lingkungan luarnya.

E. Konsepsi Penerimaan Siswa Baru

1. Penerimaan Siswa Baru

Penerimaan siswa baru adalah proses pendaftaran, penyeleksian, siswa dari sekolah lama untuk menjadi siswa baru di satu sekolah dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah. Penerimaan siswa baru merupakan salah satu kewajiban pihak sekolah dan Dinas Pendidikan setiap tahun ajaran baru.

Untuk mensukseskan proses penerimaan dan penyeleksian siswa baru tersebut, dibutuhkan beberapa langkah. Langkah-langkah ini antara lain ialah sebagai membentuk panitia penerimaan siswa baru. Panitia ini untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru, diantaranya ialah:

- Syarat-syarat pendaftaran
- Formulir pendaftaran
- Pengumuman
- Buku pendaftaran
- Waktu pendaftaran
- Dan jumlah calon yang diterima
- Menentukan syarat pendaftaran calon

Dalam proses penerimaan siswa baru yang menentukan adalah dinas terkait baik departemen agama (depag) ataupun dinas pendidikan nasional (diknas) sesuai dengan lembaga pendidikan dari SD / MI sampai SMA / MA. Pada prinsipnya untuk sekolah dasar yang sudah berumur 7 tahun dan selebihnya

memprioritaskan pada anak yang berumur 8 tahun sampai 12 tahun. Untuk SMP atau SMA yang sederajat, maka syarat-syaratnya antara lain ialah:

- Surat keterangan kelahiran atau akte
- Surat keterangan sehat
- salinan tanda lulus yang dilegalisir
- pas foto terbaru 3x4 atau 4x6 sebanyak yang diperlukan
- membayar biaya dan mengisi formulir pendaftaran

2. Buku Induk

Buku induk ialah buku catatan lengkap yang meliputi data dan identitas siswa yang sebagian diambil dari formulir siswa dan report siswa terkait prestasi siswa dari tahun ketahun kemudian masalah keutuhan dokumen berada pada tanggung jawab sekolah. Contoh identitas pada buku induk, nama murid, jenis kelamin, tempat/ tanggal lahir, warga negara, agama, anak ke, alamat, asal sekolah, tanggal penerimaan dan penetapan kelas, nama orang tua/ wali yang meliputi pendidikan, pekerjaan dan alamat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode menurut Husaini Usman (2009: 41) diartikan sebagai suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.

A. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Sukmadinata (2009;53-60), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Sukmadinata (2009:18), menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena, dan dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Peneliti kualitatif sebagai alat riset atau instrumen utama dalam penelitiannya dituntut untuk menyajikan pemahaman-pemahaman yang rasional dan gamblang mengenai fakta dan kebenaran. Oleh karena itu kualitas tinggi rendahnya hasil penelitian ditentukan oleh peneliti. Salah satu kategori penelitian kualitatif menurut Mayer dan Greenwood dalam Ulber Silalahi (2009: 27) adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif dijelaskan sebagai jenis penelitian yang pada dasarnya melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi.

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 52 tahun 2017 tentang tata cara penerimaan peserta didik di SMA Negeri 1 Labuhan Deli.

B. Definisi Konsep

Berdasarkan uraian di atas digunakan definisi konsep pemikiran untuk mempersempit penelitian yang akan diteliti yaitu:

- a. kebijakan adalah suatu ketentuan yang harus dijadikan pedoman atau pegangan sebagai petunjuk bagi setiap aparatur pemerintah sehingga tercapai tujuan yang diharapkan.
- b. Kebijakan publik adalah tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah beserta jajarannya dan masyarakat untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu.
- c. Implementasi adalah pelaksanaan suatu peraturan yang telah direncanakan atau dibuat oleh pemerintah yang kemudian akan dijalankan dengan sepenuhnya oleh masyarakat.
- d. Implementasi kebijakan publik adalah bentuk tahapan dari sebuah kebijakan.
- e. Sistem adalah satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

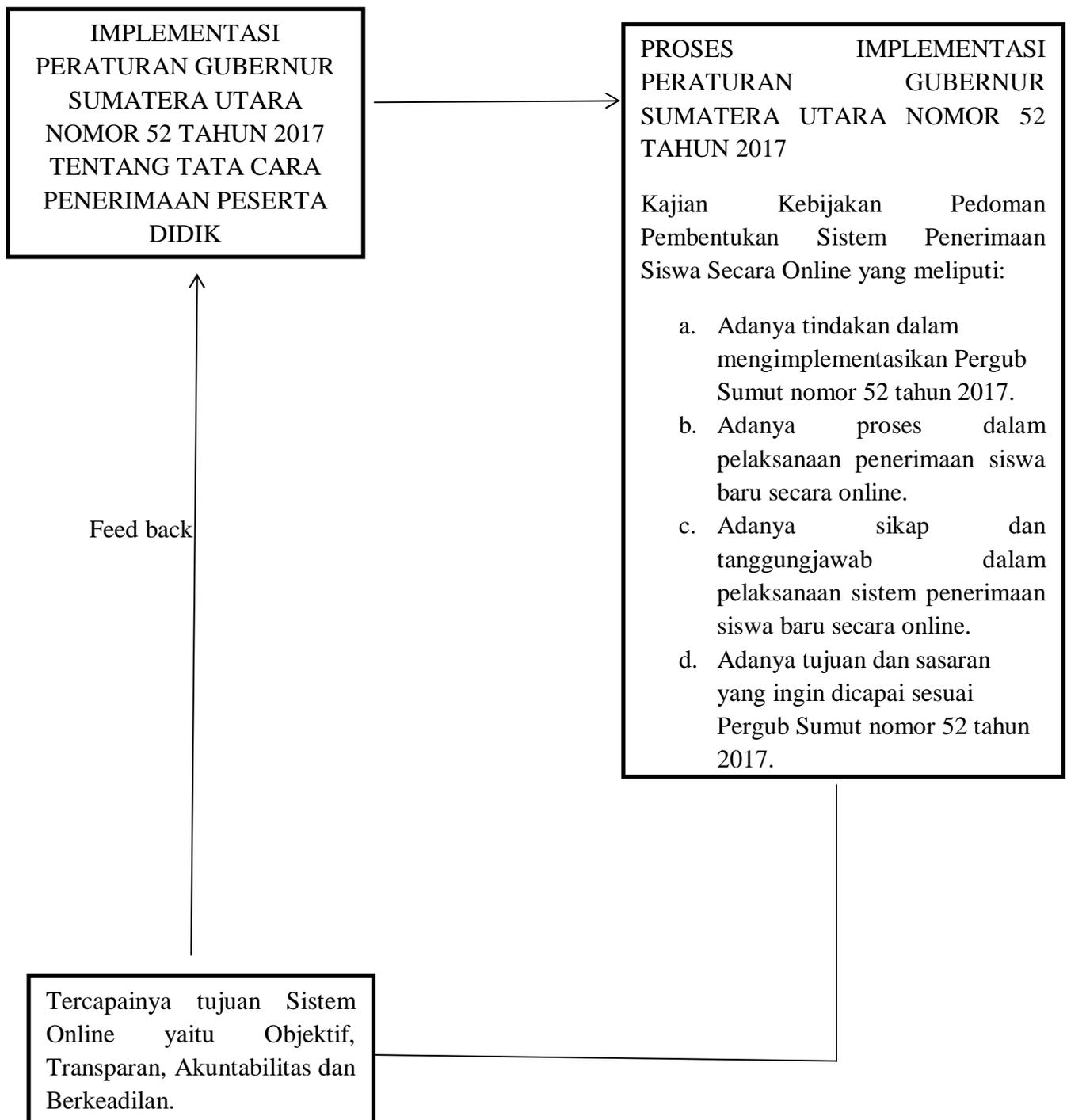
- f. Sistem online adalah tata cara yang berintergrasi dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan melalui jaringan internet.
- g. Penerimaan siswa baru adalah proses pendaftaran, penyeleksian, siswa dari sekolah lama untuk menjadi siswa baru di satu sekolah dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah.
- h. Pelaksanaan adalah upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan upaya agar menjadi optimal sesuai dengan tujuan.

C. Kerangka Konsep

Kerangka konsep berdasarkan judul penelitian ini yaitu sebagaimana tergambar dalam bagan pada halaman berikut ini:

Gambar 3.1

KERANGKA KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN



D. KATEGORISASI

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Terlaksananya tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 tahun 2017 tentang tata cara penerimaan peserta didik dengan adanya indikator seperti pembentukan dan pengawasan sistem penerimaan peserta didik baru secara online.
- b. Terlaksananya proses dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru secara online di SMA Negeri 1 Labuhan Deli dengan adanya indikator seperti aktor atau pelaku yang menjalankan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.
- c. Terlaksananya sikap dan tanggungjawab dalam penerimaan siswa baru secara online di SMA Negeri 1 Labuhan Deli dengan adanya indikator seperti kerjasama melalui rapat koordinasi antar dinas terkait dan mengontrol proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- d. Terlaksananya tujuan dari Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik dan transparan dengan

adanya indikator seperti obyektifitas, akuntabilitas dan berkeadilan dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

E. Teknik Pengumpulan Data

Agar penelitian ini dapat mencapai hasil yang maksimal, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

e. Data primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini disebut data primer.

1) Pengamatan (observasi)

Menurut Sutrisno dalam Sugiono (2003:166) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

2) Wawancara

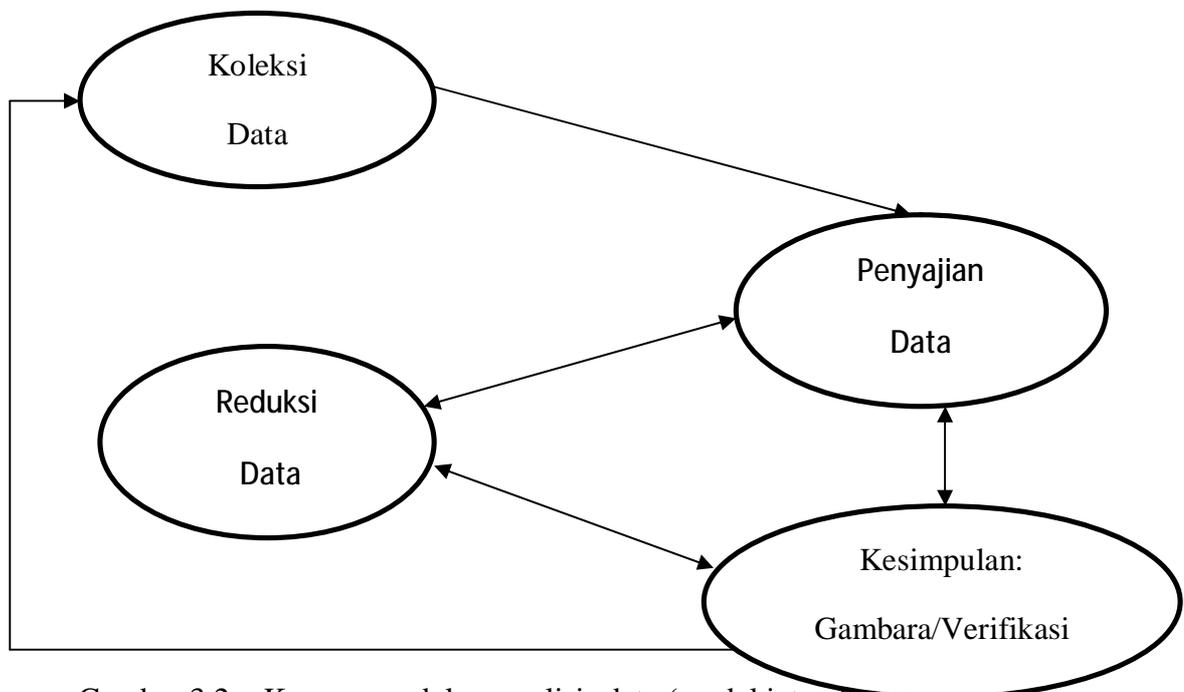
Wawancara yaitu tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dalam mengeali informasi dengan jalan tatap muka apa yang diperoleh keterangan atau penjelasan yang diperlukan melalui sumber yang berkompeten. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau orang yang diwawancara melalui rekaman, video, pengambilan foto.

f. Data sekunder

Yakni pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari buku referensi, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

F. Teknis Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiono (2012:337) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data., penyajian data, dan kesimpulan data/verifikasi. Model yang digunakan dalam teknik analisis data penelitian ini adalah model interaktif. Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3.2. : Komponen dalam analisis data (model interaktif)

G. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang implementasi peraturan gubernur Sumatera Utara nomor 52 tahun 2017 tentang tata cara penerimaan peserta didik di SMA Negeri 1 Labuhan Deli.

Penelitian ini diawali dengan mewawancarai narasumber yang mengetahui tentang peraturan-peraturan mengenai kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa baru antara lain berjumlah 7 orang :

1. Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Labuhan Deli Bidang Kurikulum
2. 3 Orang Staff Tata Usaha SMA Negeri 1 Labuhan Deli
3. 3 Orang tua siswa

H. Lokasi dan waktu penelitian

- Lokasi penelitian adalah di SMA Negeri 1 Labuhan Deli. Waktu penelitian adalah bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah SMA Negeri 1 Labuhan Deli

Sesuai dengan perkembangan dan populasi penduduk yang sangat padat, serta tuntutan akan kebutuhan sarana prasarana pendidikan dan semakin kompleksnya aktivitas masyarakat ditambah lagi dengan letak geografis Kecamatan Labuhan Deli yang berada di pinggiran kota Medan, maka

tuntutan akan kebutuhan pendidikan akan semakin terasa, terutama terhadap sekolah lanjutan negeri yang selama ini belum dimiliki oleh Kecamatan Labuhan Deli (khususnya SMA Negeri). Jika dibanding dengan kecamatan-kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli masih tertinggal dengan kecamatan-kecamatan lainnya.

Bertitik tolak dari pertimbangan dan hal-hal tersebut diatas, maka pada tahun 1997 muncul ide atau gagasan sebahagian masyarakat yang ada di Kecamatan Labuhan Deli untuk mengusulkan didirikannya SMA Negeri di Kecamatan Labuhan Deli. Namun wacana tersebut tidak dapat terealisasi, dikarenakan kurangnya akses yang dilakukan oleh masyarakat tersebut serta kurangnya dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas besarnya pengaruh tokoh-tokoh masyarakat terhadap sekolah-sekolah swasta yang ada di Kecamatan Labuhan Deli (sebab saat ini sekolah-sekolah swasta telah dahulu mendapat simpati dari masyarakat) sehingga kesan terhadap sekolah negeri sangat rendah.

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu \pm 8 tahun untuk mengubah pola pikir tokoh-tokoh tersebut ditambah dengan motivasi serta perbandingan-perbandingan dengan kecamatan lain, serta dukungan dari berbagai elemen berusaha meyakinkan bahwa tidak ada perbedaan antara sekolah swasta dan sekolah negeri ditambah lagi dengan memunculkan kesan “ yang terbaik akan dipilih oleh masyarakat” serta masing-masing sekolah akan memacu prestasi akademik untuk mencapai tujuan serta kepercayaan masyarakat.

SMA Negeri 1 Labuhan Deli dapat terealisasi melalui sebuah kumpulan yang diberi nama PPHM (Penyalur Penyambung Hasrat Masyarakat) Pada tahun 2006/2007 untuk tahun ajaran 2006/2007 Pemerintah, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deli Serdang mengizinkan untuk menerima 3 kelas, akan tetapi dikarenakan oleh tingginya animo masyarakat, maka atas usul penggagas dapat diterima 1 kelas lagi, sehingga menjadi 4 kelas dengan catatan yang satu kelas harus menyumbang untuk membuatkan 1 (satu) ruangan ditambah dengan mobilernya dan itu telah disanggupi.

Sebagai ungkapan terima kasih masyarakat atas dibukanya SMA negeri 1 Labuhan Deli, penggagas mengundang Kepala Dinas P dan P Kabupaten Deli Serdang (Drs BahrumSyah,MM) untuk membuka masa orientasi siswa dan penyerahan secara simbolis orang tua siswa kepada sekolah di Rumah Anak Madani (RAM) Pasar VII desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli.

Seiring perjalanan waktu sembari menanti bangunan dari pemerintah tahun demi tahun dilalui dengan keadaan yang serba adanya. Pada tahun ajaran 2007/2008 dan 2008/2009 Proses PSB agak stagnan, jumlah pendaftaran tidak memenuhi kuota. hal tersebut dikarenakan ketidakpastian letak gedung serta bangunan sekolah, sehingga muncul keresahan masyarakat terutama para orang tua/wali siswa sebab sampai saat itu kelanjutan pendidikan anak mereka tidak pasti ditambah lagi dengan semakin dekatnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) sebab pada saat ini sudah mendidik kelas tertinggi (kelas III).

Akan tetapi para pendidik tidak merasa kecil hati walaupun sekolah masih menumpang namun tetap bersemangat menjalankan tugas-tugasnya, mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan ekstra lainnya apakah itu pengajian, olahraga, seni serta kegiatan les-les tambahan bagi kelas tertinggi.

Berkat usaha-usaha keras para siswa, orangtua, pendidik, maka pada tahun ajaran 2008/2009 siswa SMA Negeri 1 Labuhan Deli untuk pertama kalinya melaksanakan Ujian Nasional (UN) ditempatnya dan bergabung dengan sub rayon 05 SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan dan lulus 100%. Pada tahun 2009 SMA Negeri 1 Labuhan Deli mendapat kepercayaan dari pihak kecamatan untuk menjadi petugas paskibraka tingkat kecamatan dan alhamdulillah berjalan sukses dan lancar tidak ada hambatan apapun. Pada Tahun ajaran 2009/2010 minat masyarakat terhadap SMA Negeri 1 Labuhan Deli mulai meningkat, ditandai dengan tingginya pendaftaran yang mendaftar dari 120 orang yang ditampung untuk diterima, yang mendaftar ± 235 orang. Hal tersebut dikarenakan sudah adanya kepastian letak gedung dan bangunan sehingga masyarakat sudah mulai mempercayai SMA Negeri 1 Labuhan Deli.

Gedung baru yang dimaksud sudah berdiri di lokasi Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli sebanyak 3 ruang belajar ditambah dengan 1 kantor dilengkapi dengan mobilernya. Mulai tahun ajaran 2009/2010 bangunan tersebut digunakan akan tetapi dikarenakan oleh keterbatasan jumlah maka sebagian masih tetap belajar di ruangan SMP Negeri 1 Labuhan Deli.

2. Visi dan Misi SMA Negeri 1 Labuhan Deli

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan siswa. Penyusunan visi sekolah ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di SMA Negeri 1 Labuhan Deli seperti kepala sekolah, komite sekolah, staff tata usaha dan guru sebagai staff pengajar. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di SMA Negeri 1 Labuhan Deli, maka visi nya adalah:”Terwujudnya Sekolah yang unggul di bidang iptek, berbudaya, berakhlak mulia, serta berwawasan”.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Labuhan Deli agar tercapainya visi tersebut. Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/ dikerjakan.

b. Misi

- a) Meningkatkan mutu proses pembelajaran di bidang akademik dan non akademik.
- b) Meningkatkan pembelajaran secara efektif dan inovatif.
- c) Membangun karakter, kreativitas inovasi guru dan siswa.
- d) Menciptakan lingkungan sekolah sebagai tempat belajar yang hijau, asri, ramah lingkungan dan menyenangkan.

- e) Membimbing setiap siswa untuk mengenali dan menggali potensi dirinya untuk dikembangkan secara optimal melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sekolah.
- f) Meningkatkan manajemen sekolah dan kerjasama dengan stakeholder pendidikan.

3. Gambaran Umum SMA Negeri 1 Labuhan Deli

a. Letak SMA Negeri 1 Labuhan Deli

SMA Negeri 1 Labuhan Deli terletak di dalam wilayah kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan alamat lengkap di jalan serbaguna ujung pasar IV helvetia. Luas sekolah adalah 20.000 m³, dengan 16 ruang kelas, 2 laboratorium, 1 perpustakaan dan 1 sanitasi siswa.

b. Jumlah Siswa

SMA Negeri 1 Labuhan Deli mempunyai jumlah siswa 498 orang, yang terdiri dari laki-laki: 187 orang, perempuan: 311 orang dengan rombongan belajar sebanyak 16 kelas yang terdiri dari 5 ruangan kelas 1, 5 ruangan kelas 2 dan 6 ruangan kelas 3. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1

JUMLAH SISWA

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH SISWA
1.	PEREMPUAN	311
2,	LAKI-LAKI	187
	JUMLAH	498

c. Struktur Organisasi

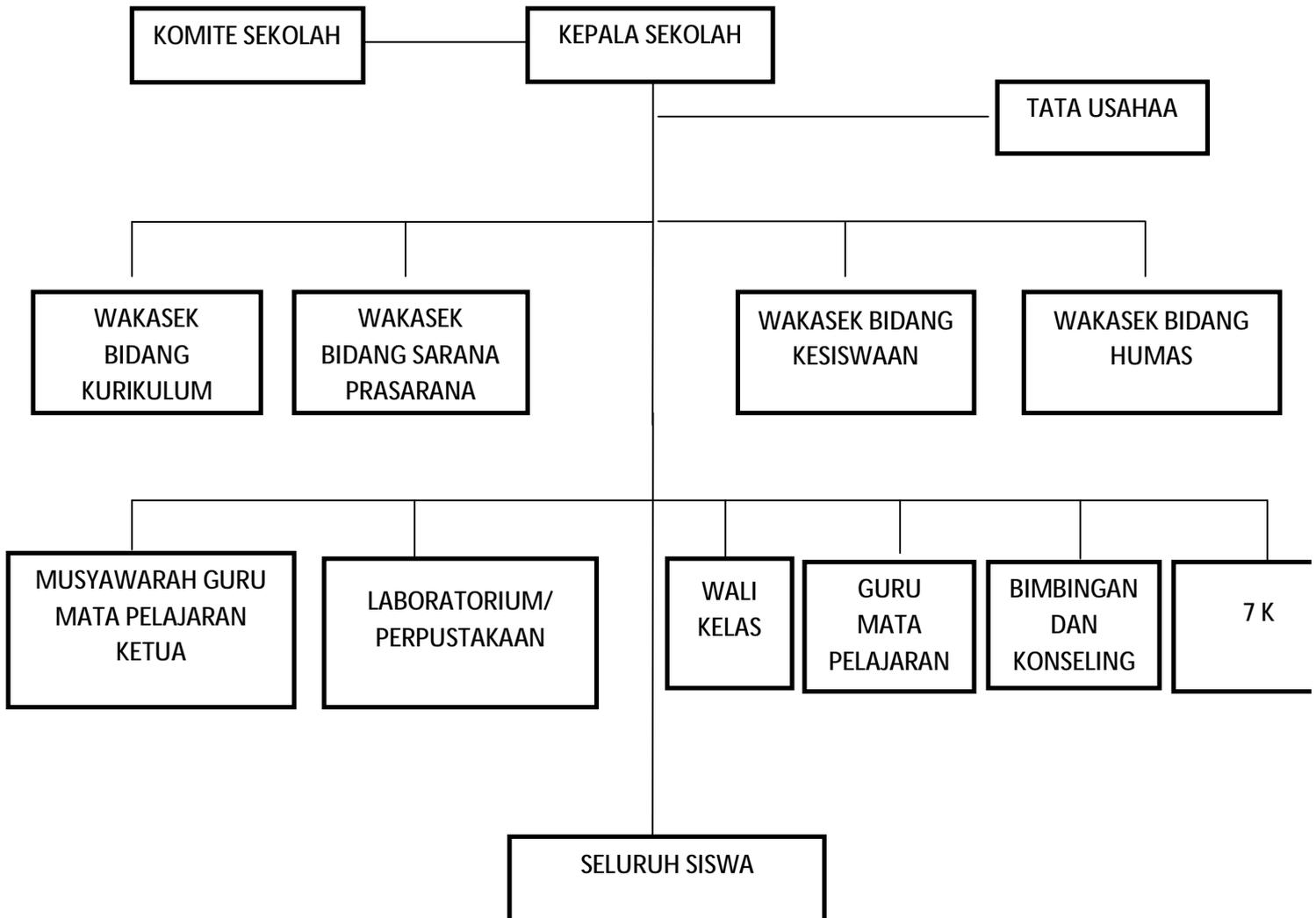
organisasi merupakan suatu fungsi manajemen yang mempunyai peranan dan berkaitan langsung dengan interaksi social yang terjadi di antara individu-individu dalam rangka kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi departemen merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu departemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya struktur organisasi, maka akan jelas pemisahan tugas dari masing-masing sampai unit-unit terkait dalam suatu organisasi.

Adapun organisasi itu adalah penggabungan orang dengan tugas-tugas yang saling berhubungan erat dengan yang lainnya agar departemen dapat dipimpin. Departemen harus memiliki struktur organisasi yang nyata dimana perbandingan antara tugas dan tanggungjawab dapat terlihat jelas, dengan demikian hubungan yang baik dalam rangka merealisasikan tujuan departemen, sehingga program kerja dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

Struktur organisasi ini juga dapat mempermudah pelaksanaan tugas-tugas di SMA Negeri 1 Labuhan Deli sehingga di perlukan struktur organisasi yang terorganisir. Adapun struktur organisasi pemerintahan SMA Negeri 1 Labuhan Deli Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

Gambar 3.3

Bagan Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Labuhan Deli



4. Tugas Dan Fungsi Pegawai di SMA Negeri 1 Labuhan Deli

. a. KEPALA SEKOLAH

Kepala sekolah mempunyai tugas sebagai leader, sebagai pendidik, sebagai manajer, sebagai administrator, sebagai supervisor, sebagai inovator dan sebagai motivator.

1. Kepala Sekolah Sebagai Leader

- a. Memiliki kepribadian yang kuat, jujur, percaya diri, bertanggung jawab, berani mengambil resiko, dan berjiwa besar
- b. Memahami kondisi guru
- c. Memiliki visi dan misi serta memahaminya
- d. Mampu mengambil keputusan, baik keputusan intrn maupun ekstern
- e. Mampu berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tertulis

2. Kepala Sekolah Sebagai Pendidik

- a. Membimbing guru dalam hal menyusun dan melaksanakan program pengajaran, mengevaluasi hasil belajar, dan melaksanakan program pengajaran dan remedial
- b. Membimbing pegawai dan karyawan dalam hal menyusun program kerja dan melaksanakan tugas sehari-hari
- c. Membimbing siswa dalam semua kegiatan sekolah
- d. Melaksanakan pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan

3. Kepala Sekolah Sebagai Manajer

- a. Mengelola administrasi kegiatan belajar mengajar dan kegiatan bimbingan

- b. Mengelola administrasi kegiatan kemuridan
 - c. Mengelola administrasi ketenagaan
 - d. Mengelola administrasi keuangan
 - e. Mengelola administrasi sarana dan prasarana
4. Kepala Sekolah Sebagai Administrator
- a. Menyusun program kerja, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang
 - b. Menyusun struktur organisasi sekolah
 - c. Menggerakkan semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas
 - d. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang terlibat dalam sekolah
 - e. Mengoptimalkan sarana yang dimiliki sekolah
5. Kepala Sekolah Sebagai Supervisor
- a. Menyusun program supervisi, pengawasan, dan evaluasi
 - b. Melaksanakan program supervisi
 - c. Merencanakan pengembangan sekolah melalui hasil supervisi
6. Kepala Sekolah Sebagai Inovator
- a. Mampu mencari dan menemukan serta mengadopsi gagasan baru dari pihak lain
 - b. Mampu melakukan pembaruan di berbagai macam kegiatan, bimbingan, dan pembinaan
7. Kepala Sekolah Sebagai Motivator
- a. Mampu mengatur lingkungan kerja

- b. Mampu mengatur suasana pelaksanaan yang memadai
- c. Mampu memberi penghargaan dan sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku

B. WAKIL KEPALA SEKOLAH

- 1. Menyusun program kerja
- 2. Melakukan perencanaan ketenagaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, penilaian, dan identifikasi, serta pengumpulan data
- 3. Mewakili kepala sekolah dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pendidikan
- 4. Membuat laporan secara berkala

C. BAGIAN KURIKULUM DAN PENGAJARAN

- 1. Menyusun program pengajaran
- 2. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan
- 3. Menyusun pembagian tugas dan jadwal pelajaran
- 4. Menyusun jadwal evaluasi belajar
- 5. Menetapkan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan
- 6. Menyusun, mengarahkan, dan mengkoordinasikan penyusunan administrasi pembelajaran
- 7. Melakukan supervisi administrasi guru
- 8. Melakukan pengarsipan program kurikulum

9. Menyusun laporan secara berkala

D. BAGIAN KESISWAAN

1. Menyusun program kerja terkait dengan pembinaan kesiswaan
2. Melaksanakan arahan dan bimbingan serta pengendalian kegiatan kesiswaan
3. Membina organisasi siswa
4. Menyusun jadwal pembinaan siswa
5. Meningkatkan pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, dan keteladanan, serta keterbukaan.
6. Melaksanakan seleksi siswa berprestasi
7. Mengatur mutasi siswa
8. Menyusun panitia penerimaan siswa baru dan pelaksanaan orientasi siswa baru dan siswa lama
9. Menyusun jadwal kegiatan akhir tahun
10. Membuat laporan kegiatan kesiswaan secara berkala

E. BAGIAN SARAN DAN PRASARANA

1. Menyusun program pengadaan sarana dan prasarana sekolah
2. Mengkoordinasikan penggunaan sarana dan prasarana sekolah
3. Mengelola perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah
4. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan sarana sekolah
5. Melakukan pembukuan sarana dan prasarana sekolah
6. Menyusun laporan secara berkala

F. HUMAS SEKOLAH

1. Menyusun rogram kerja humas sekolah
2. Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan dewan sekolah
3. Membina hubungan antara sekolah dengan wali murid
4. Membina pengembangan sekolah dengan lembaga pemerintah dan lembaga sosiala lainnya
5. Melaksanakan koordinasi dengan semua tenaga pendidik dan kependidikan untuk kelancaran kegiatan sekolah
6. Menciptakan hubungan yang kondusif antara sekolah dan warga
7. Mewakili kepala sekolah dan wakil kepala sekolah apabila berhalangan terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan sekolah
8. Menyusun laporan secara berkala

G. BAGIAN TATA USAHA

1. Menyusun program kerja tata usaha sekolah
2. Melakukan pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk
3. Malakukan pengurusan dan pelaksanaan administrasi sekolah
4. Menyusun administrasi sekolah meliputi kurikulum, kesiswaan, dan kepegawaian
5. Menyusun data statistik sekolah
6. Menyusun tugas staf tata usaha dan tenaga teknis lainnya
7. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi terkait dengan adminstrasi sekolah
8. Meyusun laporan secara berkala

H. BAGIAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH

1. Menyusun program kerja perpustakaan sekolah
2. Menyusun dan melaksanakan perencanaan pengadaan bahan pustaka
3. Memberikan pelayanan di perpustakaan
4. Menyusun dan melaksanakan perencanaan pengembangan perpustakaan
5. Melakukan inventarisasi bahan pustaka
6. Menyusun administrasi perpustakaan sekolah
7. Menyusun tata tertib perpustakaan
8. Melakukan perawatan bahan pustaka
9. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala

I. TENAGA PENDIDIK ATAU GURU

1. Menyusun administrasi pembelajaran dengan baik dan lengkap
2. Melaksanakan kegiatan proses pembelajaran
3. Melaksanakan evaluasi kegiatan proses pembelajaran
4. Melaksanakan penilaian kegiatan proses pembelajaran
5. Membuat laporan tentang hasil kegiatan proses pembelajaran
6. Mengisi daftar nilai siswa
7. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan kegiatan proses pembelajaran
8. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan arahan kepada siswa
9. Melakukan pengembangan kegiatan proses pembelajaran

10. Melakukan koordinasi dan evaluasi terkait dengan kegiatan proses pembelajaran

11. Mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan oleh sekolah

J. WALI KELAS

1. Membuat program kerja kelas
2. Melaksanakan kegiatan bimbingan, arahan, serta pembinaan kepada siswa
3. Menyusun pengelolaan kelas meliputi denah tempat duduk siswa dan mensetting suasana kelas sesuai dengan situasi dan kondisi
4. Menyusun administrasi kelas meliputi jadwal pelajaran, presensi, jurnal, dan tata tertib siswa, serta penilaian siswa
5. Menyusun statistik perkembangan siswa
6. Menyusun laporan kegiatan kelas secara berkala

K. GURU PIKET

1. Menyusun administrasi kedisiplinan guru dan siswa
2. Mencatat kedatangan dan kepulangan guru dan siswa
3. Melakukan pengawasan saat kegiatan proses pembelajaran berlangsung
4. Menertibkan kelas-kelas yang kosong (karena guru tidak masuk)
5. Melaporkan kejadian yang bersifat kasuistik kepada wali kelas, kesiswaan, dan kepala sekolah (sesuai dengan kasus yang terjadi)
6. Mengawasi berlakunya tata tertib sekolah
7. Menyusun laporan secara berkala

L. BAGIAN BIMBINGAN KONSELING

1. Menyusun program kerja layanan bimbingan konseling
2. Melakukan koordinasi dengan wali kelas terkait masalah siswa yang membutuhkan penanganan khusus
3. Memberikan layanan dan bimbingan kepada siswa dalam kegiatan proses pembelajaran
4. Memberikan bimbingan dan arahan yang positif dan motivasi kepada siswa
5. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan layanan bimbingan konseling
6. Membuat statistik perkembangan layanan bimbingan konseling
7. Menyusun rencana tindak lanjut dari hasil program layanan bimbingan konseling
8. Menyusun laporan kegiatan layanan bimbingan konseling secara berkala

BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

A.Penyajian Data

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah di dapat dari hasil penelitian di lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara Tanya jawab dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dilapangan melalui wawancara secara langsung di SMA Negeri 1 Labuhan Deli serta beberapa sumber data berupa dokumen, arsip dan referensi lainnya yang diperoleh di SMA Negeri 1 Labuhan Deli terkait dengan Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik dalam rangka Pelaksanaan Sistem Penerimaan Siswa Baru Secara online di SMA Negeri 1 Labuhan Deli adalah sebagai berikut:

1.Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber penelitian, maka data-data tersebut akan di deskripsikan sehingga masalah penlitian tentang implementasi peraturan gubernur sumatera utara nomor 52 tahun 2017 tentang tata cara penerimaan peserta didik dalam rangka pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru secara online di SMA Negeri 1 Labuhan Deli dapat terjawab dan di analisa.

Untuk mendukung perolehan data selain data primer maka data sekunder sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan

tingkat karakteristik jawaban para narasumber. Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif kualitatif.

a.Deskripsi Data Narasumber

a). Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber di kelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.1 berikut dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori.

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	FREKUENSI
1	LAKI-LAKI	3
2	PEREMPUAN	4
	JUMLAH	7

Berdasarkan table 4.1 yang tercermin diatas dapat dilihat bahwa narasumber dari jenis kelamin laki-laki dalam frekuensi sebanyak 4 orang, sedangkan responden perempuan sebanyak 3 orang.

b). Distribusi Narasumber Menurut Umur

Berdasarkan umur, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan umur 30-45 tahun, dan narasumber dengan umur 46-60 tahun. Pada tabel 4.2 berikut dijelaskan untuk masing-masing kategori.

Tabel 4.2

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

NO	UMUR	FREKUENSI
1	30-45	5
2	46-60	2
	JUMLAH	7

Berdasarkan tabel 4.2 yang tercermin di atas dapat dilihat bahwa narasumber di kelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan umur 30-45 tahun sebanyak 5 orang, narasumber dengan umur 46-60 tahun sebanyak 2 orang.

c). Distribusi Narasumber Menurut Jabatan/pekerjaan

Berdasarkan yang dilihat dari tingkat jabatan atau pekerjaan narasumber di kelompokkan menjadi dua kelompok yaitu pegawai di SMA Negeri 1 Labuhan Deli dan Masyarakat/Orang tua siswa. Pada tabel 4.3 berikut dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori tersebut menurut jabatan atau pekerjaan yang dimiliki para peserta wawancara.

Tabel 4.3**Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan/Pekerjaan**

NO	JABATAN PEKERJAAN	FREKUENSI
1	PEGAWAI	4
2	MASYARAKAT/ORANG TUA SISWA	3
	JUMLAH	7

Berdasarkan tabel 4.3 yang tercemin diatas dapat dilihat bahwa narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan pekerjaan sebagai pegawai di SMA Negeri 1 Labuhan Deli sebanyak 4 orang, dan narasumber masyarakat/Orang tua siswa dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sebanyak 3 orang.

B. Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi**1. Deskripsi hasil analisis jawaban Narasumber Pegawai SMA Negeri 1 Labuhan Deli****a. Adanya tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 tahun 2017**

Tindakan dalam implementasi mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari senin, 5 maret 2018 pukul 10:30 WIB dengan bapak Drs. Sujono yang menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMA Negeri 1 Labuhan Deli, mengatakan bahwa tindakan dan upaya dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 tahun 2017 dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru secara online berjalan lancar. Hal ini dapat dilihat dari kesiapan pihak sekolah selaku panitia, di dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) sebagai panitia pelaksanaan. Menempatkan guru-guru atau pegawai sesuai dengan kemampuannya di dalam menjalankan program penerimaan siswa baru secara online. Misalnya bagian pengimputan data calon siswa dipilih lah guru yang benar-benar menguasai sistem komputerisasi. Akan tetapi dari segi sumber daya manusia (SDM) dari masyarakat selaku orang tua siswa masih kurang memadai untuk menjalankan sistem ini.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengimplementasikan pergub tersebut dengan menerima jumlah siswa sesuai dengan kuota calon siswa yang telah ditentukan oleh pihak dinas. Melibatkan pihak-pihak yang dianggap berkaitan langsung dengan berjalannya proses penerimaan siswa online. Pihak-pihak tersebut antara lain pihak Dinas pendidikan provinsi, pihak sekolah yang terdiri atas kepala sekolah sebagai penanggungjawab, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, komite sekolah, dan staff tata usaha serta masyarakat yang berperan penting dalam penyelenggaraan sistem online ini agar berjalan lancar.

Dengan demikian adanya kebijakan Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 52 tahun 2017 tentang tata cara penerimaan peserta didik di SMA Negeri 1 Labuhan Deli dilaksanakan dengan tata cara yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

b. Adanya proses dalam pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru secara online

Proses implementasi dalam pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru secara online bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan dan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber penelitian dapat diambil sebuah pemahaman tentang proses pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru secara online melalui penyuluhan, memberikan pemahaman kepada calon siswa tentang tata cara pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru secara online.

Hasil data yang di dapat peneliti melalui wawancara terhadap narasumber pada hari senin, 5 maret 2018 pukul 10:30 dengan bapak Drs. Sujono tentang proses pelaksanaan pendaftaran calon siswa baru yang dilakukan pihak sekolah melalui pengumuman di majalah dinding sekolah, atau melalui website resmi dinas pendidikan yang dapat di lihat di situs kemendikbud.com berjalan lancar.

Dikarenakan sistem ini masih tergolong sangat baru di terapkan, banyak pihak yang masih belum bisa menerima sistem ini secara utuh. Seperti pihak sekolah yang masih sulit menyediakan akses layanan untuk calon siswa, serta

kurangnya pemahaman dari orang tua siswa maupun calon siswa itu sendiri terkait dengan sistem penerimaan siswa baru secara online. Sehingga calon siswa masih meminta bantuan kepada pihak sekolah untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta didik. Seharusnya dalam sistem online ini calon siswa mendaftarkan dirinya sendiri secara online lalu memberikan data bahawasanya ia telah mendaftar kepada pihak sekolah untuk diverifikasi kepada pihak Dinas.

Dinas provinsi belum siap sepenuhnya untuk menjalankan sistem online ini, hal ini dapat dilihat dari terjadinya beberapa kali pengunduran waktu pengumuman siswa baru.

c.adanya sikap dan tanggung jawab dalam pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru secara online.

Implementator harus memiliki sikap dan tanggung jawab berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini implementator mengatur tata cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari senin, 5 maret 2018 pukul 10:30 WIB dengan bapak Drs. Sujono mengatakan bahwa pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru secara online tidak terlepas dari adanya sikap dan tanggung jawab dinas pendidikan provinsi selaku penyelenggara dan pengawas serta pihak SMA Negeri 1 Labuhan Deli sebagai pihak pelaksana.

Didalam program ini dinas pendidikan provinsi melakukan sosialisasi kepada pihak SMA Negeri 1 Labuhan Deli agar pihak sekolah mempersiapkan

segala sesuatunya saat pelaksanaan penerimaan siswa secara online tersebut agar berjalan lancar dan sesuai yang diharapkan.

Pihak sekolah SMA Negeri 1 Labuhan Deli akan melakukan penyuluhan dan informasi kepada masyarakat khususnya bagi calon siswa yang akan mengikuti seleksi masuk menggunakan sistem online ini dengan memberikan pengetahuan tata cara yang benar agar nantinya mempermudah calon siswa dalam menjalankan sistem ini.

Akan tetapi terdapat beberapa kendala di dalam terlaksananya program ini, di saat terdapat masalah dari pihak sekolah dan pihak sekolah melaporkan kepada dinas provinsi, tanggapan dari pihak dinas terkesan cukup rumit dan kurang memperhatikan masukan dan komplain dari pihak sekolah. namun seiring berjalannya program ini kedepannya ada kerja sama yang akan terus di perbaiki di dalam sistem ini agar lebih baik lagi

D.adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 tahun 2017

Tujuan dan sasaran Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 52 tahun 2017 adalah untuk meningkatkan obyektifitas, transparansi, akuntabilitas dan keadilan didalam proses pelaksanaan penerimaan siswa baru.

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari senin, 5 maret 2018 pukul 10:30 WIB dengan bapak Drs.Sujono tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2017, pelaksanaan penerimaan siswa baru

secara online belum berjalan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu diperlukan peran penting dinas pendidikan serta pihak sekolah untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar sistem penerimaan siswa baru secara online berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan adanya sistem pembagian zonasi di dalam pemilihan sekolah yang ditujuh, membuat sebagian masyarakat menganggap sistem ini belum sepenuhnya berkeadilan. Karena terkadang jarak tempuh sekolah yang zonasi nya ditentukan cukup jauh dari rumah. Selebihnya sistem ini dianggap lebih transparan dan objektif dikarenakan setiap hal terkait pelaksanaan penerimaan siswa baru secara online yang dilakukan SMA Negeri 1 Labuhan Deli harus dilaporkan kepada pihak dinas, mulai dari penerimaan yang diterima perhari oleh pihak sekolah sampai hari terakhir pendaftaran. Oleh sebab itu dengan sistem ini lebih transparan dan obyektifitas.

C. Analisis Data dan Pembahasan

Penerimaan siswa baru merupakan salah satu proses yang ada di instansi pendidikan seperti sekolah yang berguna untuk menyaring calon siswa yang terpilih sesuai kriteria yang ditentukan oleh sekolah tersebut untuk menjadi siswa didiknya.

Menurut teori Jones dalam mulyadi (2016:45) Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mempunyai tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan diterapkan. Berdasarkan analisis jawaban dari Narasumber penelitian yang dibagi menjadi 2 dari Pegawai SMA Negeri 1 Labuhan Deli selaku

pelaksana kebijakan dan orang tua siswa yang menjadi penikmat kebijakan. Disini dapat kita lihat bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh pihak SMA negeri 1 Labuhan Deli melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik yang bertujuan untuk menciptakan sistem penerimaan siswa baru yang transparan, obyektifitas, akuntabilitas dan berkeadilan belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa masih banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya paham akan sistem ini, yang diakibatkan dari kurangnya sosialisasi pihak sekolah SMA Negeri 1 Labuhan Deli kepada masyarakat/orang tua siswa terkait proses penerimaan siswa baru secara online. Selain itu juga lemah nya sumber daya manusia dari masyarakat itu sendiri yang membuat tindakan yang dilakukan pihak SMA Negeri 1 Labuhan Deli menjadi kurang efektif. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi juga belum siap akan sistem ini, terlihat dari beberapa kali terjadi penundaan waktu pengumuman penerimaan siswa baru.

Pengimplementasian suatu kebijakan didalamnya juga terdapat proses yang akan mewujudkan kebijakan hingga memperlihatkan hasilnya. Proses di dalam pengimplementasian Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 tahun 2017 yang dilakukan pihak SMA Negeri 1 Labuhan Deli belum sesuai sebagaimana mestinya. Dalam penerimaan siswa baru terdapat proses dimana siswa melakukan pendaftaran kepada pihak sekolah pilihan pertama dengan membawah berkas/syarat-syarat pendaftaran yang telah diumumkan oleh pihak sekolah melalui majalah dinding. Bagi siswa yang sudah memenuhi persyaratan maka pihak sekolah mendaftarkan nya melalui sistem online dengan mengirimkan

data NISN kepada pihak dinas pendidikan provinsi. Setelah itu pihak sekolah memverifikasi data siswa.

Pada proses pendaftaran siswa ini terdapat kekeliruan antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Seharusnya orang tua siswa/siswa nya sendiri lah yang mendaftarkan dirinya melalui sistem penerimaan siswa secara online. Setelah mendaftar secara online, siswa memberikan bukti pendaftaran nya kepada pihak sekolah lalu pihak sekolah memverifikasinya.

Merujuk pada permasalahan yang dilihat dari proses pelaksanaan penerimaan siswa baru yang tidak berjalan secara mestinya. Ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan provinsi maupun pihak sekolah SMA Negeri 1 labuhan deli serta kurangnya kesadaran serta pemahaman orang tua siswa terkait dengan sistem penerimaan siswa baru secara online. Seharusnya pemerintah lebih jeli lagi dalam memberikan penalaran kepada masyarakat tentang tata cara penerimaan peserta didik, agar masyarakat lebih memahami akan sistem penerimaan siswa baru secara online yang sedang dilaksanakan.

Merujuk dari sebuah tindakan dan proses dari jalannya sebuah kebijakan sangat perlu untuk mengetahui sejauhmana sikap dan tanggung jawab pemerintah didalam berjalannya kebijakan tersebut. Mengimplementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 52 tahun 2017 Dinas Pendidikan Provinsi mempunyai tanggung jawab untuk memberikan sosialisasi kepada pihak sekolah terkait penerimaan siswa secara online. Sosialisasi yang dilakukan melalui diklat yang diadakan oleh dinas pendidikan provinsi. Selain itu pihak sekolah melakukan

koordinasi kepada dinas pendidikan provinsi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru online. Sikap dan tanggung jawab pihak sekolah untuk melaporkan segala kendala atau proses pelaksanaannya, namun dari pihak dinas tidak memberikan respon yang baik atas keluhan yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Kurangnya respon yang diberikan oleh pihak dinas pendidikan provinsi menandakan adanya kesenjangan antara dinas pendidikan provinsi dengan pihak sekolah. Hal ini juga bisa diakibatkan dari lemahnya kapasitas server serta kurang tanggapnya serta tidak siapnya pihak dinas pendidikan provinsi didalam menjalankan sistem penerimaan siswa secara online sehingga pelaksanaan dalam kebijakan tidak berjalan semestinya.

Sikap dan tanggung jawab pihak dinas maupun pihak sekolah sangat diperlukan agar pelaksanaan dari sistem online ini dapat berjalan dengan lancar. Dinas Pendidikan Provinsi seharusnya lebih mensosialisasikan sistem ini kepada sekolah maupun kepada orang tua siswa sehingga tujuan dari sistem online dapat terlaksana.

Menurut Grindle dalam mulyadi (2016:47) bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan penerimaan siswa baru secara online yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Labuhan deli belum tercapai. Tidak tercapainya tujuan ini dikarenakan masih banyak kendala yang dialami oleh pihak dinas, pihak sekolah maupun masyarakat. Kurangnya koordinasi, sosialisasi, sumber daya manusia (SDM) yang

dimiliki masyarakat membuat tujuan dari sistem online tidak terealisasi secara sempurna. Sistem zonasi yang dipakai dalam sistem ini pun membuat salah satu tujuan sistem online yaitu berkeadilan tidak sepenuhnya adil bagi sebagian masyarakat, karena terkadang jarak tempuh sekolah yang zonasi nya ditentukan cukup jauh dari rumah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisa data, keterangan dan penjelasan yang penulis peroleh maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di SMA Negeri 1 Labuhan Deli sudah mengikuti prosedur yang berlaku, akan tetapi belum maksimal seperti yang diharapkan pada tujuan dari Peraturan tersebut yaitu transparan, obyektifitas, akuntabilitas dan berkeadilan.
2. Baik pegawai di SMA Negeri 1 Labuhan Deli maupun masyarakat masih belum mengetahui dengan jelas mengenai Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 52 tahun 2017 tentang tata cara penerimaan peserta didik.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi di SMA Negeri 1 Labuhan Deli dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 52 tahun 2017 tentang tata cara penerimaan peserta didik yang dituangkan dalam pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru secara online adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas maupun Sekolah, kurangnya koordinasi yang dilakukan dinas dan sekolah serta kurangnya sarana dan prasarana yang ada.
4. Respon masyarakat terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 52 tahun 2017 tentang tata cara penerimaan peserta didik antara

masyarakat masih belum memahami dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) orang tua siswa.

B. Saran

Saran adalah suatu masukan yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan. Dimana saran sebagai masukan bagi pihak terkait yang menjadi objek penelitian pada waktu yang akan datang.

1. Diharapkan lebih meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 52 tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik yang dituangkan dalam pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru secara online.
2. Diharapkan agar kedepannya mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat yang kurang memahami sistem penerimaan siswa baru secara online, pemerintah perlu memberikan pemberian informasi kepada masyarakat agar tujuan dari sistem online dapat tercapai.
3. Diharapkan kedepannya SMA Negeri 1 Labuhan Deli untuk lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait sistem penerimaan siswa baru secara online.
4. Kepada pegawai staf-staf di SMA Negeri 1 Labuhan Deli untuk lebih meningkatkan pelayanan didalam pelaksanaan penerimaan siswa baru secara online.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Munandi, Muhammad, 2017, *Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan*, Ar-Ruz Media, Yogyakarta.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik; Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- , 2016, **Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik; Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik**, Alfabeta, Bandung.
- Tahir, Arifin, 2014, **Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**, Alfabeta, Bandung.
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho, 2003, **Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi**, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D**, Alfabeta, Bandung.
- Nurdin, usman, 2004, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2002, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Thoha, Miftah, 2011, **Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Abdul Wahab, Solichin, 2012, **Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hasibuan, Melayu S.P, 2006, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Husain Usman, Purnomo Setiady Akbar, 2009, **Metodologi Penelitian Sosial**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2009, **Metode Penelitian Pendidikan**, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Dunn, William N, 2003, **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sukamdinata, Nana Syaodih, 2006, **Metode Penelitian Pendidikan**, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Sugiyono, 2003, **Metode Penelitian Bisnis**, Edisi 1, Alfabeta, Bandung.

Tangkilisan, 2003, **Metode The Policy-Making Process**, Engleword Cliffs, Prentice Hall.

AG, suabrsono, 2010, **Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sugiyono, 2012, **Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)**, Alfabeta, Bandung.

Sumber Internet

Dosen.fkip.uns.ac.id

<http://www.temukanonline.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan_dan_luar_jaringan.

<http://www.homefage.ga/2016/04/dulu-istilah-online-tak-setenar-seperti.html>.

Sumber Peraturan

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik

Gambar 3.3

Bagan Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Labuhan Deli

